

EKONOMI MARITIM DAN PENGEMBANGAN *BLUE ECONOMY* DI WILAYAH SULAWESI TENGGARA: STUDI KASUS PADA TELUK MORAMO, KABUPATEN WAKATOBI, KABUPATEN KONAWE SELATAN, DAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Gusti Putu Yuda Wirashana¹, Widi Darmadiatmika Tanaya², Muh. Rafly Dwiputra³,
Nurul Maghfirah Miftahul Jannah⁴, Sityama Munawar Dewi⁵, Amanah Asri
Estikawati⁶, Made Adya Febriana Putri⁷, Eliyanti Agus Mokodompit⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

Email: amanahasri07@gmail.com

Abstrak

Ekonomi maritim dan ekonomi biru merupakan pendekatan penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut secara produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi, tantangan, dan strategi pengembangan ekonomi maritim berbasis *blue economy* di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan literatur sistematis terhadap artikel ilmiah, data statistik, dokumen hukum, serta informasi relevan mengenai sektor kelautan dan perikanan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar pada perikanan tangkap laut, budidaya rumput laut, pengolahan hasil perikanan, perdagangan antarpulau, dan pariwisata bahari berbasis konservasi. Potensi ekonomi biru juga terlihat pada ekowisata Teluk Moramo, pengolahan hasil perikanan di Konawe Kepulauan, pemberdayaan rumput laut di Konawe Selatan, serta pariwisata bahari berkelanjutan di Wakatobi. Namun, pengembangan sektor tersebut masih menghadapi tantangan berupa tekanan terhadap ekosistem laut, lemahnya penanganan pascapanen, keterbatasan modal dan teknologi, akses informasi pasar, infrastruktur yang belum memadai, serta koordinasi antarpemangku kepentingan yang belum optimal. Oleh karena itu, penguatan konservasi, hilirisasi produk, digitalisasi, ekowisata berbasis masyarakat, infrastruktur maritim, dan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.

Kata Kunci: Ekonomi Maritim, Pengembangan Ekonomi Biru.

Abstract

Maritime economy and the blue economy are important approaches for optimizing the use of marine resources in a productive, inclusive, and sustainable manner. This study aims to analyze the potential, challenges, and development strategies of a blue economy-based maritime economy in Southeast Sulawesi Province. The study employed a qualitative approach through a systematic literature review of scientific articles, statistical data, legal documents, and relevant information concerning the marine and fisheries sectors. The findings indicate that Southeast Sulawesi has substantial potential in marine capture fisheries, seaweed cultivation, fisheries processing, inter-island trade, and conservation-based marine tourism. The potential of the blue economy is also reflected in marine ecotourism in Teluk Moramo, fisheries processing in Konawe Kepulauan, seaweed community empowerment in Konawe Selatan, and sustainable marine tourism in Wakatobi. However, the development of these sectors continues to face challenges, including pressure on marine ecosystems, weak post-harvest handling, limited capital and technology, inadequate market information, insufficient infrastructure, and suboptimal coordination among stakeholders. Therefore, strengthening

marine conservation, product downstreaming, digitalization, community-based ecotourism, maritime infrastructure, and cross-sector collaboration is necessary to achieve a sustainable blue economy in Southeast Sulawesi.

Keywords: *Maritime Economy, Blue Economy Development.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara bahari dan kepulauan dengan potensi ekonomi kelautan yang besar dan beragam. Wilayah laut Indonesia, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, mencapai sekitar 5,8 juta km² dan didukung garis pantai sepanjang 95.181 km. Kondisi tersebut menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu basis penting pembangunan ekonomi nasional, meskipun pemanfaatannya masih memerlukan penguatan agar mampu memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat (Triarso & Putro, 2019).

Pemanfaatan potensi maritim tidak dapat lagi bertumpu pada pola eksploitasi sumber daya semata. Pemanfaatan sumber daya laut yang tidak memperhatikan daya dukung ekosistem berpotensi menimbulkan tekanan terhadap sumber daya perikanan dan lingkungan pesisir serta memengaruhi keberlanjutan mata pencaharian masyarakat. Dengan demikian, pengembangan ekonomi maritim perlu diarahkan pada pemanfaatan yang produktif, bernilai tambah, inklusif, dan berkelanjutan agar kekayaan laut dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir (Dewi et al., 2025).

Pendekatan blue economy atau ekonomi biru menjadi relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Konsep ini menekankan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, inovasi teknologi, dan perlindungan ekosistem laut. Dalam konteks Indonesia, penerapan ekonomi biru banyak diarahkan pada pengembangan perikanan, infrastruktur kelautan yang berkelanjutan, serta pengelolaan sumber daya berdasarkan prinsip efisiensi alam dan zero waste (Latif et al., 2023).

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki peluang besar dalam pengembangan ekonomi maritim berbasis blue economy. Karakter wilayah pesisir dan kepulauan, didukung potensi perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, pariwisata bahari, serta perdagangan antarpulau, merupakan modal penting dalam pembangunan daerah. Potensi tersebut perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk, perluasan kesempatan kerja, penguatan usaha masyarakat pesisir, dan keberlanjutan ekosistem laut.

Besarnya potensi sektor perikanan laut Sulawesi Tenggara terlihat dari volume produksi perikanan tangkap laut pada tahun 2024 yang mencapai 270.452 ton. Data tersebut menunjukkan bahwa perikanan laut merupakan sektor strategis yang dapat dikembangkan melalui penguatan rantai pasok, pengolahan hasil perikanan, peningkatan mutu produk, akses pasar, serta penerapan teknologi yang ramah lingkungan (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, 2026). Pengembangan tersebut sejalan dengan temuan bahwa teknologi informasi dan komunikasi, perikanan tangkap, serta produksi budidaya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi biru di wilayah kepulauan Indonesia (Marwa et al., 2024).

Meskipun demikian, pengembangan ekonomi maritim di Sulawesi Tenggara masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur dan teknologi, pengolahan hasil laut yang belum optimal, akses permodalan, kualitas sumber daya manusia, serta ketergantungan pada penjualan komoditas primer. Selain itu, penerapan ekonomi biru juga berhadapan dengan risiko kerusakan ekosistem, konflik pemanfaatan ruang laut, kebijakan yang belum terintegrasi, keterbatasan pendanaan, dan lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan (Latif et al., 2023).

Oleh karena itu, pengembangan blue economy di Sulawesi Tenggara memerlukan kebijakan yang terarah melalui harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan dan kerja sama

kelaunan, integrasi data serta informasi laut, dan peningkatan riset serta teknologi kelaunan (Darajati, 2024). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian berjudul “Ekonomi Maritim dan Pengembangan *Blue Economy* di Wilayah Sulawesi Tenggara” penting dilakukan untuk menganalisis potensi, tantangan, dan arah strategi pengembangan ekonomi maritim yang berkelanjutan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Ekonomi Maritim

Ekonomi maritim merupakan seluruh kegiatan ekonomi yang berbasis pada laut, wilayah pesisir, dan sumber daya kelaunan. Konsep ini tidak hanya mencakup industri yang secara langsung memanfaatkan laut, tetapi juga aset, barang, dan jasa yang dihasilkan oleh ekosistem laut (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2016). Dengan demikian, ekonomi maritim memandang laut sebagai ruang produksi, distribusi, konektivitas, serta penyedia jasa ekosistem yang mendukung kehidupan dan aktivitas ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, ekonomi maritim memiliki cakupan yang luas, meliputi perikanan, energi dan sumber daya mineral, transportasi laut, industri maritim, pariwisata bahari, pembangunan kelaunan, serta pengelolaan pulau-pulau kecil. Cakupan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelaunan yang menempatkan sumber daya kelaunan sebagai modal pembangunan nasional yang perlu dimanfaatkan secara terpadu dan berkelanjutan (Republik Indonesia, 2014).

Secara operasional, ekonomi maritim dapat dikelompokkan ke dalam tiga bidang utama. Pertama, kegiatan berbasis sumber daya, seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, budidaya rumput laut, serta pemanfaatan energi kelaunan. Kedua, kegiatan jasa dan konektivitas, seperti pelabuhan, transportasi laut, logistik, perdagangan antarpulau, dan pariwisata bahari. Ketiga, kegiatan berbasis ekosistem, yaitu pemanfaatan jasa lingkungan laut, konservasi, rehabilitasi pesisir, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Ketiga bidang tersebut saling berkaitan dalam menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir.

Pengembangan ekonomi maritim tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi primer. Penguatan rantai nilai diperlukan melalui perbaikan mutu hasil laut, pengolahan pascapanen, ketersediaan rantai dingin, akses pasar, inovasi teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, ekonomi maritim harus diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif, terutama bagi nelayan, pembudidaya, pelaku usaha pengolahan, dan masyarakat pesisir.

2. *Blue Economy*

Blue economy atau ekonomi biru merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi kelaunan dan kesehatan ekosistem laut sebagai tujuan yang tidak dapat dipisahkan. Bank Dunia mendefinisikan *blue economy* sebagai pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki mata pencaharian, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga kesehatan ekosistem laut (World Bank & United Nations Department of Economic and Social Affairs [UN DESA], 2017).

Prinsip utama *blue economy* meliputi pemanfaatan sumber daya sesuai daya dukung lingkungan, perlindungan dan pemulihan ekosistem laut, efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan limbah dan pencemaran, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Pendekatan ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi kelaunan harus menghasilkan nilai ekonomi tanpa mengurangi kemampuan laut untuk menopang kehidupan dan kegiatan ekonomi pada masa depan.

Dalam penerapannya, *blue economy* dapat diwujudkan melalui perikanan tangkap yang terukur dan berbasis kuota, budidaya laut yang berkelanjutan, pengembangan produk olahan

bernilai tambah, konservasi kawasan laut, pengendalian sampah plastik, serta pengembangan pariwisata bahari yang bertanggung jawab. Selain itu, tata ruang laut, data kelautan, riset, inovasi, dan pengawasan menjadi instrumen penting agar pemanfaatan laut tidak menimbulkan konflik ruang maupun kerusakan ekosistem (Darajati, 2024).

Dengan demikian, hubungan antara ekonomi maritim dan *blue economy* bersifat saling melengkapi. Ekonomi maritim menunjukkan sektor-sektor dan aktivitas ekonomi yang dapat dikembangkan dari laut, sedangkan *blue economy* menyediakan prinsip dan arah pengelolaannya agar kegiatan tersebut berkelanjutan, efisien, dan berkeadilan. Dalam konteks Sulawesi Tenggara, pendekatan ini relevan untuk mengarahkan pengembangan perikanan, rumput laut, pengolahan hasil laut, pariwisata bahari, dan perdagangan antarpulau secara produktif sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut.

C. METODE

Penelitian kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur sistematis menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka diperoleh tidak hanyadari penelitian terdahulu, tetapi juga dari beberapa sumber lain yang berkaitan dengantopik penelitian. Suumber data yang diolah antara lain artikel penelitian, berita online, dan informasi berbasis hukum lainnya. Metodologi yang digunakan dalampenelitianini menggunakan pendekatan kualitatif (penelitian berbasis kualitatif), denganmenggunakan metode berfikir deduktif (deductive method), yaitu menganalisisfenomena pengetahuan umum atau fakta umum untuk mendapatkan kesimpulan tertentu (Zulkarnaen et al., 2020). Data-data ini digunakan karena dapat diakses denganmudah dan ketersediaannya sangat memadai. Sampel data yang digunakan berupapublikasi selama beberapa tahun terakhir. Fenomena-fenomena yang terjadi kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, karena didasarkan pada peristiwa/masalah dan akibat yang ditimbulkannyaserta lebih mudah digambarkan dan dijelaskan tanpa variabel.

D. HASIL & PEMBAHASAN

1. Sektor Maritim Berpotensi Ekonomi

Sektor maritim memiliki potensi ekonomi yang besar karena laut tidak hanya berfungsi sebagai ruang perairan, tetapi juga sebagai sumber daya produksi, jalur distribusi, dan ruang strategis bagi pembangunan. Ekonomi maritim mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya laut, antara lain perikanan, transportasi laut, pelabuhan, perdagangan, pariwisata bahari, eksplorasi sumber daya alam laut, serta industri pendukungnya. Dengan ruang lingkup tersebut, sektor maritim dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir (Fitrilia et al., 2024).

Potensi pertama terdapat pada transportasi dan perdagangan laut. Pelabuhan serta jaringan logistik laut berperan sebagai penghubung antara wilayah produksi, pasar domestik, dan pasar internasional. Infrastruktur pelabuhan yang efektif dapat memperlancar arus barang, menekan biaya distribusi, mendukung aktivitas ekspor-impor, serta memunculkan peluang usaha pada sektor pergudangan, pengangkutan, bongkar muat, dan jasa logistik. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur maritim perlu dipahami bukan hanya sebagai pembangunan fisik, tetapi juga sebagai investasi untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah dan nasional (Fitrilia et al., 2024).

Potensi kedua adalah sektor perikanan dan budidaya laut. Perikanan menyediakan pangan, bahan baku industri, kesempatan kerja, serta sumber pendapatan bagi masyarakat pesisir. Nilai ekonominya tidak berhenti pada hasil tangkapan, tetapi berkembang melalui kegiatan pengolahan, pengemasan, penyimpanan, distribusi, dan pemasaran. Komoditas seperti ikan, udang, kerang, dan rumput laut dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih besar apabila

diolah menjadi produk bernilai jual tinggi. Karena itu, penguatan industri hilir perikanan menjadi penting agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati pada tahap produksi primer (Fitrilia et al., 2024).

Selain perikanan, sektor maritim juga memiliki peluang pada pariwisata bahari, pemanfaatan energi laut, serta eksplorasi sumber daya kelautan. Pantai, terumbu karang, dan keanekaragaman hayati laut dapat menjadi daya tarik wisata, sedangkan energi gelombang, pasang surut, arus, dan angin laut berpotensi mendukung diversifikasi energi. Namun, seluruh potensi tersebut perlu dikelola melalui kebijakan yang terintegrasi, infrastruktur yang memadai, inovasi teknologi, dan prinsip keberlanjutan. Pengelolaan yang tidak memperhatikan kelestarian ekosistem berisiko menurunkan produktivitas sumber daya laut dalam jangka panjang (Fitrilia et al., 2024).

2. Potensi *Blue Economy* Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara memiliki potensi *blue economy* yang kuat melalui pengembangan ekowisata bahari berbasis konservasi. Studi di Pulau Wawosunggu, Kawasan Konservasi Daerah Teluk Moramo, menunjukkan bahwa ekosistem terumbu karang berada dalam kondisi baik dengan tutupan karang hidup sebesar 53%. Kawasan tersebut juga memiliki 55 jenis ikan karang dari 22 famili dan kelimpahan ikan karang sebesar 42.556 individu per hektare. Kondisi ekologis ini merupakan modal penting untuk mengembangkan wisata snorkeling dan selam yang berbasis pada perlindungan ekosistem (Mangidi et al., 2025).

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pulau Wawosunggu sesuai dikembangkan untuk wisata snorkeling dengan Indeks Kesesuaian Wisata sebesar 75,44% dan wisata selam sebesar 79,63%. Daya dukung kawasan mencapai 511 orang per hari untuk snorkeling dan 155 orang per hari untuk selam. Data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan wisata bahari dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan masyarakat lokal, tetapi jumlah dan jenis aktivitas wisata tetap perlu disesuaikan dengan kapasitas ekologis kawasan (Mangidi et al., 2025).

Pengembangan ekowisata bahari di Teluk Moramo perlu menempatkan konservasi sebagai dasar pengelolaan. Pengaturan jumlah wisatawan, penerapan aturan untuk tidak merusak terumbu karang, pengelolaan sampah, penyediaan fasilitas yang ramah lingkungan, dan pelibatan masyarakat lokal dalam jasa wisata merupakan langkah penting. Dengan pendekatan tersebut, manfaat ekonomi dari pariwisata dapat diperoleh secara berkelanjutan tanpa mengurangi fungsi ekologis terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut (Mangidi et al., 2025).

Potensi *blue economy* berikutnya terletak pada pengolahan hasil perikanan di Desa Pasir Putih, Kabupaten Konawe Kepulauan. Ketersediaan sumber daya ikan yang melimpah belum sepenuhnya menghasilkan manfaat ekonomi optimal karena sebagian hasil tangkapan tidak tertangani dengan baik, mengalami penurunan mutu, tidak terjual, bahkan terbuang. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya ketersediaan sumber daya, melainkan juga lemahnya penanganan pascapanen, inovasi produk, dan akses pemasaran (Bubun et al., 2025).

Penerapan *blue economy* di Desa Pasir Putih dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan pengolahan ikan menjadi kerupuk, penerapan teknologi pemasaran digital, serta pendampingan kelompok masyarakat. Program tersebut meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mitra sebesar 95% dalam pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Diversifikasi produk olahan ikan berpotensi memperpanjang daya simpan produk, meningkatkan nilai tambah, memperluas pasar, dan menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat pesisir (Bubun et al., 2025).

Keberlanjutan pengembangan ini memerlukan dukungan peralatan pengering, sertifikasi halal, izin Pangan Industri Rumah Tangga, serta penguatan pemasaran digital. Dengan demikian, *blue economy* tidak hanya dimaknai sebagai pemanfaatan hasil laut, tetapi

juga sebagai upaya mengurangi kehilangan hasil, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan membangun rantai nilai perikanan yang memberi manfaat ekonomi lebih luas kepada masyarakat lokal (Bubun et al., 2025).

Rumput laut merupakan komoditas strategis dalam pengembangan *blue economy* Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Konawe Selatan. Pengelolaan rumput laut berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir karena didukung oleh ketersediaan sumber daya lokal, keterlibatan petani-nelayan, dan peluang pasar. Namun, pengembangan usaha masih menghadapi persoalan akses modal, informasi harga, teknologi, pemasaran, serta posisi tawar petani dalam hubungan dengan pedagang pengumpul (Rayuddin et al., 2025).

Penggunaan teknologi informasi melalui WEB penyuluhan merupakan strategi penting untuk memperkuat usaha rumput laut masyarakat pesisir. Media ini dapat memudahkan petani memperoleh informasi mengenai teknik budidaya, kebutuhan sarana produksi, pengolahan hasil, akses pembiayaan, harga pasar, dan jaringan pemasaran. Ketersediaan informasi yang cepat dan relevan dapat meningkatkan kemampuan petani dalam mengambil keputusan usaha, memperluas pilihan pasar, serta mengurangi ketergantungan pada pedagang pengumpul. Penerapan teknologi tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan kelembagaan masyarakat pesisir agar proses pemberdayaan berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan (Rayuddin et al., 2025).

Walaupun demikian, akses terhadap informasi regulasi harga masih rendah, sedangkan keterbatasan modal ekonomi dan lemahnya posisi tawar petani perlu menjadi perhatian. Karena itu, pengembangan *blue economy* pada komoditas rumput laut perlu diarahkan pada penguatan kelembagaan, akses pembiayaan, informasi pasar yang transparan, pengolahan produk bernilai tambah, serta penyuluhan digital yang mudah diakses. Strategi tersebut dapat mengurangi ketergantungan petani pada pedagang pengumpul dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir (Rayuddin et al., 2025).

Wakatobi merupakan salah satu kawasan pariwisata bahari unggulan Sulawesi Tenggara yang memiliki kekuatan pada terumbu karang, keanekaragaman hayati laut, aktivitas snorkeling dan selam, serta keunikan budaya masyarakat pesisir. Potensi tersebut menempatkan Wakatobi sebagai destinasi yang relevan dikembangkan dalam kerangka *blue economy*, karena daya tarik wisatanya bergantung langsung pada kualitas ekosistem laut. Pengembangan pariwisata Wakatobi tidak hanya dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga mendorong tumbuhnya usaha lokal, seperti jasa pemandu wisata, transportasi laut, homestay, kuliner, kerajinan, dan produk usaha mikro masyarakat pesisir (Mahrudin et al., 2025).

Nilai penting pariwisata Wakatobi terletak pada keterkaitan antara konservasi laut dan kesejahteraan masyarakat. Ekowisata bahari perlu dikembangkan dengan menjaga terumbu karang, mengendalikan sampah, membatasi aktivitas wisata yang berpotensi merusak lingkungan, serta memperkuat edukasi wisatawan. Selain itu, kearifan lokal masyarakat Bajo Mola dapat menjadi modal sosial dalam pengelolaan wisata berkelanjutan. Tradisi konservasi seperti duata sangal, parika, dan pamali mencerminkan nilai lokal yang mendukung perlindungan sumber daya laut dan perlu diintegrasikan ke dalam tata kelola destinasi wisata (Marlina et al., 2020). Namun, pengembangan pariwisata bahari Wakatobi masih memerlukan perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan promosi, dan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pengelola kawasan konservasi, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan organisasi lingkungan menjadi kunci untuk menyatukan kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Melalui tata kelola kolaboratif dan berbasis masyarakat, Wakatobi berpotensi berkembang sebagai destinasi pariwisata bahari yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dalam mendukung *blue economy* Sulawesi Tenggara (Mahrudin et al., 2025).

3. Tantangan Pengembangan *Blue Economy* Sulawesi Tenggara

Pengembangan perikanan, budidaya, dan pariwisata bahari dapat meningkatkan tekanan terhadap terumbu karang, keanekaragaman hayati, dan kualitas perairan apabila tidak dikelola sesuai daya dukung lingkungan. Tantangan ini penting karena ekosistem laut merupakan aset utama bagi ekonomi pesisir. Studi di Pulau Wawosunggu menunjukkan bahwa pengembangan wisata bahari perlu mempertimbangkan kesesuaian kawasan dan daya dukung lingkungan agar manfaat ekonomi tidak menyebabkan degradasi ekosistem dalam jangka panjang (Mangidi et al., 2025).

Ketersediaan sumber daya ikan yang melimpah belum selalu menghasilkan kesejahteraan masyarakat apabila hasil tangkapan tidak ditangani, diolah, dan dipasarkan secara baik. Di Desa Pasir Putih, Kabupaten Konawe Kepulauan, hasil tangkapan berisiko mengalami penurunan mutu, tidak terserap pasar, bahkan terbuang akibat keterbatasan penanganan ikan, inovasi produk, peralatan pengolahan, dan akses pemasaran. Oleh sebab itu, fasilitas penyimpanan, pengeringan, pengolahan, sertifikasi produk, serta pemasaran digital perlu diperkuat agar hasil laut memiliki nilai tambah lebih tinggi (Bubun et al., 2025).

Pelaku usaha rumput laut dan perikanan skala kecil masih menghadapi keterbatasan modal usaha, akses teknologi, informasi harga, dan jaringan pemasaran. Ketergantungan pada pedagang pengumpul dapat melemahkan posisi tawar petani dan nelayan dalam menentukan harga produk. Karena itu, pengembangan *blue economy* perlu didukung oleh penyuluhan digital, akses pembiayaan yang sesuai, penguatan kelompok usaha atau koperasi, serta informasi pasar yang mudah dijangkau oleh masyarakat pesisir (Rayuddin et al., 2025).

Pengembangan *blue economy* melibatkan pemerintah, masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya, pelaku usaha, pengelola kawasan konservasi, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Apabila perencanaan dan pelaksanaan program berjalan sendiri-sendiri, manfaat ekonomi berpotensi tidak merata dan perlindungan lingkungan menjadi kurang efektif. Pengalaman pengembangan pariwisata bahari di Wakatobi menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur, rendahnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya sinergi antarpemangku kepentingan dapat menghambat keberlanjutan pariwisata laut (Mahrudin et al., 2025).

Wilayah pesisir dan kepulauan membutuhkan infrastruktur yang memadai, seperti pelabuhan perikanan, rantai dingin, sarana pengolahan, transportasi laut, jaringan internet, serta fasilitas wisata yang ramah lingkungan. Keterbatasan infrastruktur dapat meningkatkan biaya distribusi, menghambat pemasaran produk hasil laut, dan membatasi akses masyarakat terhadap peluang ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur perlu dipadukan dengan penerapan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan agar mendukung produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut (Bubun et al., 2025).

4. Strategi Pengembangan Ekonomi Biru di Sulawesi Tenggara

Pengembangan ekonomi biru di Sulawesi Tenggara perlu dilaksanakan melalui strategi yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, perlindungan ekosistem laut, peningkatan nilai tambah komoditas, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Strategi tersebut perlu disesuaikan dengan potensi utama daerah, yaitu perikanan, rumput laut, ekowisata bahari, pengolahan hasil laut, serta konektivitas antarpulau.

Pemerintah daerah perlu memperkuat perlindungan terumbu karang, kawasan konservasi, mangrove, dan ekosistem pesisir sebagai fondasi ekonomi biru. Pemanfaatan kawasan wisata bahari dan perikanan harus disesuaikan dengan daya dukung lingkungan agar kegiatan ekonomi tidak mengurangi kualitas ekosistem. Pengaturan zonasi, pembatasan aktivitas wisata pada kawasan rentan, pengawasan sampah laut, rehabilitasi terumbu karang, dan edukasi lingkungan bagi masyarakat serta wisatawan perlu diterapkan secara konsisten (Mangidi et al., 2025).

Strategi berikutnya adalah meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan melalui pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pemasaran produk hasil laut. Nelayan dan kelompok usaha pesisir perlu didorong untuk tidak hanya menjual ikan dalam bentuk segar, tetapi juga menghasilkan produk olahan seperti kerupuk ikan, abon, ikan asap, produk beku, dan produk pangan lokal lainnya. Strategi ini dapat mengurangi kehilangan hasil, memperpanjang daya simpan produk, memperluas pasar, dan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir (Bubun et al., 2025).

Pemanfaatan teknologi digital perlu diperluas untuk menyediakan informasi harga, cuaca, produksi, pemasaran, pembiayaan, dan inovasi pengolahan hasil laut. WEB penyuluhan, media sosial, dan platform perdagangan daring dapat digunakan untuk memperluas jaringan pasar komoditas perikanan dan rumput laut. Selain itu, pelatihan literasi digital bagi nelayan, pembudidaya, perempuan pesisir, dan pelaku UMKM perlu dilakukan secara berkelanjutan agar teknologi dapat dimanfaatkan secara efektif dan inklusif (Rayuddin et al., 2025).

Ekowisata bahari di Wakatobi, Teluk Moramo, dan wilayah pesisir lainnya perlu dikembangkan dengan menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama. Masyarakat dapat terlibat dalam penyediaan homestay, jasa pemandu selam dan snorkeling, transportasi laut, kuliner, kerajinan, serta pengelolaan sampah wisata. Pengembangan wisata juga perlu mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat pesisir, khususnya nilai konservasi yang hidup dalam komunitas Bajo, agar manfaat ekonomi pariwisata berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem laut (Mahrudin et al., 2025).

Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan, rantai dingin, gudang penyimpanan, sarana pengeringan, transportasi laut, dan jaringan internet di wilayah pesisir serta kepulauan. Infrastruktur tersebut penting untuk menurunkan biaya distribusi, menjaga mutu hasil tangkapan, memperlancar perdagangan antarpulau, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pasar. Penguatan konektivitas maritim juga akan mendukung pertumbuhan perikanan, pariwisata, industri pengolahan, dan usaha mikro di kawasan pesisir (Fitrilia et al., 2024).

Pengembangan ekonomi biru membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat pesisir, pelaku usaha, perguruan tinggi, pengelola kawasan konservasi, dan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah daerah perlu membangun forum koordinasi yang menyatukan perencanaan sektor perikanan, pariwisata, lingkungan hidup, perindustrian, perdagangan, dan infrastruktur. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat lokal, dan keberlanjutan sumber daya laut tetap terjaga (Mahrudin et al., 2025).

E. KESIMPULAN

Ekonomi maritim merupakan seluruh aktivitas ekonomi yang memanfaatkan ruang laut, wilayah pesisir, dan sumber daya kelautan, sedangkan blue economy menjadi pendekatan pembangunan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi, kelestarian ekosistem, dan pemerataan manfaat bagi masyarakat pesisir sebagai satu kesatuan. Di Sulawesi Tenggara, potensi tersebut tercermin pada sektor perikanan dan pengolahannya, budidaya rumput laut, transportasi serta perdagangan laut, dan pariwisata bahari berbasis konservasi.

Potensi pengembangan ekonomi biru di Sulawesi Tenggara dapat dilihat melalui ekowisata Teluk Moramo, pengolahan hasil perikanan di Konawe Kepulauan, pemberdayaan usaha rumput laut di Konawe Selatan, serta pariwisata bahari Wakatobi. Pengembangan sektor-sektor tersebut perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk, penguatan kapasitas masyarakat, perlindungan ekosistem pesisir dan laut, serta perluasan akses pasar agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata. Namun, pengembangan ekonomi biru masih menghadapi tekanan terhadap ekosistem laut, keterbatasan infrastruktur dan teknologi,

lemahnya rantai nilai pascapanen, keterbatasan modal dan informasi, serta belum optimalnya koordinasi antaraktor. Oleh karena itu, strategi yang diperlukan meliputi penguatan konservasi, hilirisasi hasil kelautan dan perikanan, digitalisasi pemasaran, pengembangan ekowisata yang bertanggung jawab, perbaikan konektivitas antarwilayah, serta kolaborasi lintas sektor. Dengan strategi tersebut, ekonomi biru di Sulawesi Tenggara dapat menjadi instrumen pembangunan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. (2026). *Provinsi Sulawesi Tenggara dalam angka 2026*. <https://sultra.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/0a2f575443da4bc73c5fd629/provinsi-sulawesi-tenggara-dalam-angka-2026.html>
- Bubun, R. L., Murniati, & Makmur, M. R. (2025). Implementasi *blue economy* dalam pengelolaan hasil laut di Desa Pasir Putih Kabupaten Konawe Kepulauan. *Agrokreatif Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 11(3), 550–558. <https://doi.org/10.29244/agrokreatif.11.3.550-558>
- Darajati, M. R. (2024). Urgensi implementasi konsep ekonomi biru dalam tata kelola sektor kelautan Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 14(1), 15–22. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v14i1.12972>
- Fitrilia, N., Ria, N., Fauzi, N., & Malik, A. (2024). Ekonomi politik sektor maritim. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 9165–9171.
- Mahrudin, Purwanto, Astuti, R. S., & Dwimawanti, I. H. (2025). Stakeholder collaboration in the development of sustainable marine tourism in Wakatobi Regency, Indonesia. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(14), 638–651. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.914MG0050>
- Mangidi, S. S., Sadarun, B., & Ketjulan, R. (2025). Potensi terumbu karang dan daya dukung Pulau Wawosunggu sebagai destinasi ekowisata bahari di Kawasan Konservasi Daerah Teluk Moramo Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Sains dan Inovasi Perikanan*, 9(1), 90–103. <https://doi.org/10.33772/jsipi.v9i1.1120>
- Marlina, Sumarmi, & Astina, I. K. (2020). Sustainable marine ecotourism management: A case of marine resource conservation based on local wisdom of Bajo Mola community in Wakatobi National Park. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 32(4), 1317–1323. <https://doi.org/10.30892/gtg.32419-575>
- Marwa, T., Muizzuddin, Bashir, A., Andaiyani, S., & Cahyadi, A. (2024). Determinants of the blue economy growth in the era of sustainability: A case study of Indonesia. *Economies*, 12(11), Article 299. <https://doi.org/10.3390/economies12110299>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2016). *The ocean economy in 2030*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264251724-en>
- Rayuddin, Mustam, Nur, M., & Dahliana, B. (2025). Pemberdayaan petani rumput laut melalui WEB penyuluhan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat lokal Konawe Selatan. *Jurnal Penyuluhan*, 21(2), 311–320. <https://doi.org/10.25015/21202546365>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38710/uu-no-32-tahun-2014>
- Triarso, I., & Putro, S. P. (2019). Pengembangan budidaya perikanan produktif berkelanjutan sistem IMTA (*Integrated Multi-Trophic Aquaculture*) (Studi kasus di Kepulauan Karimunjawa, Jepara). *Life Science*, 8(2), 192–199.
- World Bank, & United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2017). *The potential of the blue economy: Increasing long-term benefits of the sustainable use of marine resources for small island developing states and coastal least developed countries*. World Bank.

Zulkarnaen, W., et al. (2020). Harmonization of sharia rules in effort copyright protection in Indonesia. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2612–2616. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I2/S20201311>.